

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan menyajikan gambaran umum tentang obyek ataupun subyek yang meliputi kondisi geografis, sosial ekonomi dan kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

A. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Berikut ini merupakan peta Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota :

Gambar 4.1
Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Wikipedia

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Pulau Jawa, terletak di antara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letak Provinsi Jawa Tengah berada di antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Utara kearah Selatan sejauh 226 km dan dari arah Barat ke Timur adalah 263 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Gambaran kondisi topografi di wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, kondisi tersebut meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa dibagian tengah, dataran rendah yang hampir tersebar diseluruh Jawa Tengah dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan.

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas seluruh Pulau Jawa dan 1,70% dari luas seluruh negara Indonesia. Luas wilayah tersebut terdiri dari 991 ribu hektar (30,45%) berupa lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,55 %) berupa bukan lahan sawah.

Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang, secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 35 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) dengan 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 669 kelurahan. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah berbatasan oleh :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Jawa Barat

Sebelah Timur : Jawa Timur

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 35 kabupaten/kota yang membawahi sebanyak 573 kecamatan dan 8.578 kelurahan/desa. Dari 35 kabupaten/kota yang ada, 29 adalah kabupaten dan 6 adalah kota. Sedangkan dari 8.578 kelurahan/desa, 7.809 berstatus sebagai desa dan 769 lainnya adalah kelurahan. Dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 8.578, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia.

Tabel 4.1
Karakteristik Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 2012-2016

Wilayah Administrasi	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35
• Kabupaten	29	29	29	29	29
• Kota	6	6	6	6	6
kecamatan	573	573	573	573	573
Desa/Kelurahan	8.578	8.578	8.578	8.578	8.578
• Desa	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809
• Kelurahan	769	769	769	769	769

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah 2016

B. Kondisi Kemiskinan

Dalam arti kebutuhan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut (Chambers dalam Chriswardani Suryawati, 2005), kemiskinan merupakan suatu situasi permasalahan yang memiliki lima unsur, yaitu : 1) kemiskinan (proper), 2) kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (state of emergency), 3) ketidakberdayaan (powerless), 4) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis, dan 5) ketergantungan (dependence).

Berbagai masalah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah salah satu yang paling menjadi isu strategis dan sangat perlu ditangani yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan modal yang dimiliki terbatas sehingga pengetahuan dan keterampilan seseorang menjadi rendah, produktivitas rendah, serta pendapatan yang diterima menjadi rendah sehingga nilai tukar hasil produksi orang miskin menjadi lemah.

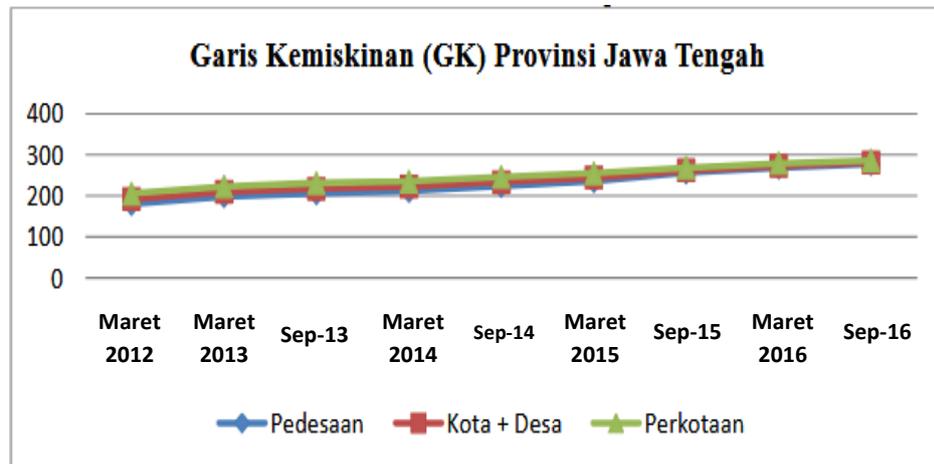
Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 153 Milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1,146 Trilyun. Salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan peningkatan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, namun masih dirasa kurang efektif karena penurunan jumlah penduduk miskin dirasa masih lambat. Terbukti hingga tahun 2016 tercatat jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah sebanyak 4,56 juta jiwa atau 13,58%. Belum signifikannya penurunan jumlah penduduk miskin dikarenakan cara kinerja pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang belum optimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari program tersebut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2012	5.218.178	16.12
2013	5.256.962	16.22
2014	4.864.500	14.99
2015	4.812.300	14.45
2016	4.562.830	13.59

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2012-2016 mengalami naik turunnya jumlah penduduk miskin, dapat dilihat pada tabel 4.2 jumlah penduduk miskin meningkat terdapat pada tahun 2013 dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebesar 5.218.178 (ribu jiwa)/ 16.12% yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 5.256.962 (ribu jiwa)/ 16.22%. Peningkatan tersebut terhenti pada tahun selanjutnya tahun 2014 hingga tahun 2016, pada tahun tersebut jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 sebesar 4.864.500 (ribu jiwa)/ 14.99%, sementara pada tahun 2015 sebesar 4.812.300 (ribu jiwa)/ 14.45%, pada tahun 2016 sebesar 4.562.830 (ribu jiwa)/ 13.59%.

Grafik 4.1 Garis Kemiskinan Maret 2012 – September 2016

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Garis Kemiskinan (GK) merupakan gambaran batas pendapatan yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau porsi tingkat pendapatan masyarakat yang sudah ditentukan. Berdasarkan grafik 4.1 Garis Kemiskinan (GK) diatas, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 kemiskinan mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 naik sebesar 3,13% dari Rp. 238.056 (Maret) menjadi Rp. 282.570 (September). Tingkat Garis Kemiskinan di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan Garis Kemiskinan perkotaan.

Dalam proses perhitungan, Garis Kemiskinan (GK) sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah penduduk miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata biaya pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan termasuk dalam batasan penduduk miskin.

Gambar 4.2
Komoditas Makanan dan Non Makanan



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Tabel 4.3
Komposisi Garis Kemiskinan melalui Makanan

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	beras	34,38	beras	38,29
2	Rokok kretek filter	16,08	Rokok kretek filter	10,61
3	Telur ayam ras	5,30	tempe	5,57
4	tempe	5,03	Telur ayam ras	4,62
5	Gula pasir	3,96	Gula pasir	4,35
6	tahu	3,74	Tahu	3,91
7	Mie instan	3,65	Mie instan	3,46
8	Daging ayam ras	3,16	Bawang merah	2,59
9	Bawang merah	1,97	Daging ayam ras	2,47
10	Susu kental manis	1,58	Kopi	1,55

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa komoditas makanan lebih tinggi dibandingkan komoditas bukan makanan pada Komposisi Garis Kemiskinan di Jawa Tengah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat lebih banyak pada komoditas makanan di Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran masyarakat kota berupa makanan pokok sebesar 34,38% sementara pengeluaran masyarakat desa berupa makanan pokok sebesar 38,29%.

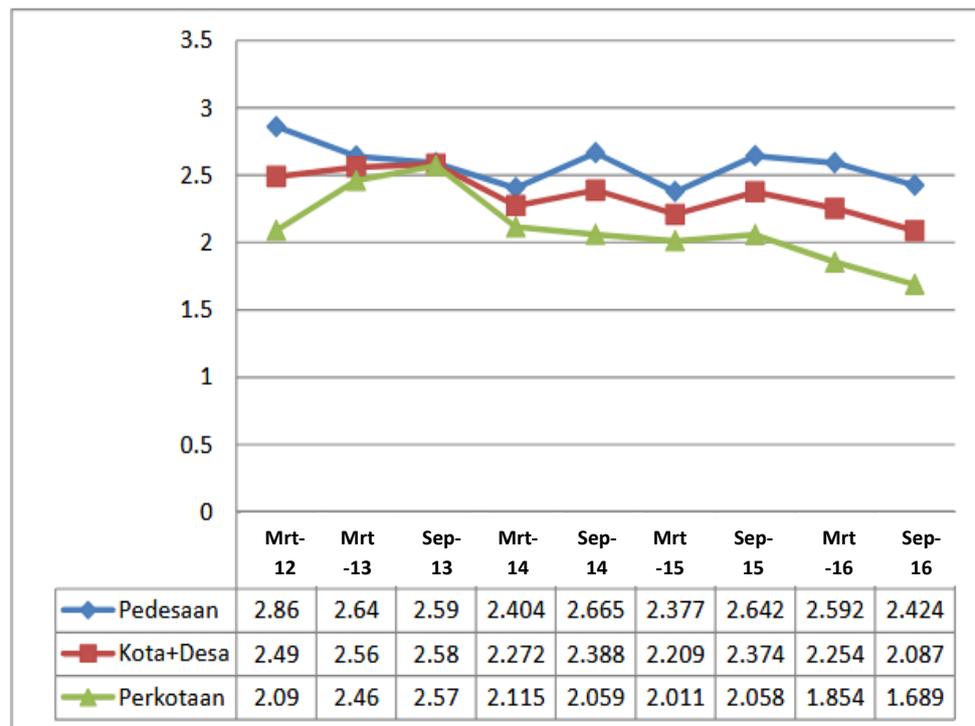
Tabel 4.4
Komposisi Garis Kemiskinan melalui Non-Makanan

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	perumahan	20,27	Perumahan	21,21
2	Listrik	9,46	Bensin	9,16
3	pendidikan	9,22	Pakaian anak-anak	7,93
4	Bensin	9,12	Listrik	7,33
5	Pakaian jadi anak-anak	7,85	Pakaian jadi perempuan dewasa	7,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Dari gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa komoditas makanan lebih banyak jika dibandingkan dengan komoditas bukan makanan dalam Komposisi Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat ekonomi rendah masyarakat cenderung untuk pengeluaran kebutuhan makanan. Secara keseluruhan peranan komoditas makanan terhadap Garis kemiskinan (GK) adalah sebesar 72,84%.

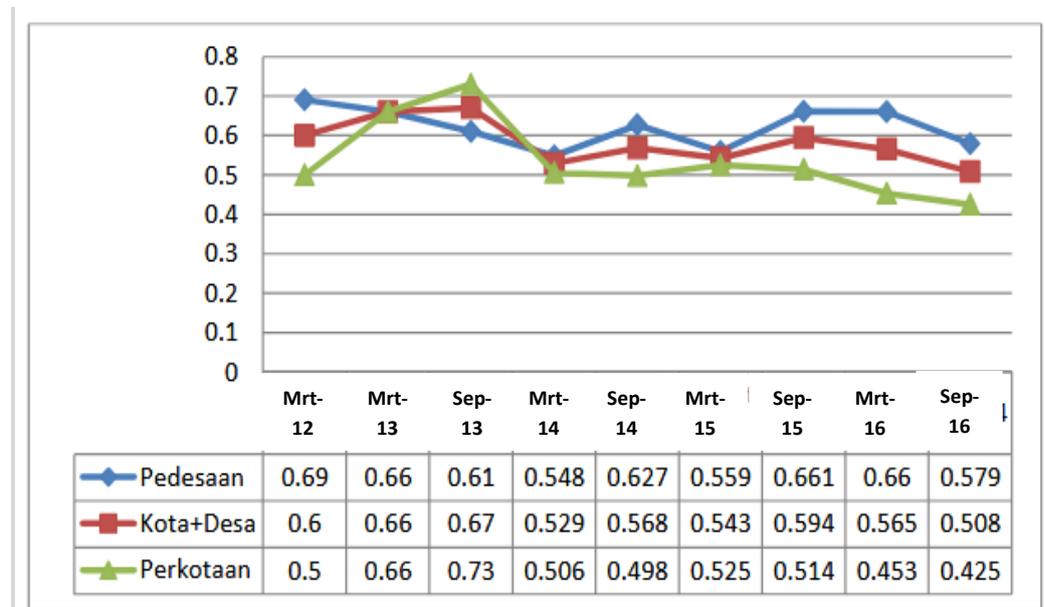
Grafik 4.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Berdasarkan grafik 4.2 tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah di pedesaan pada awal tahun 2012 mencapai angka 2.86 hingga akhir tahun 2016 mengalami penurunan ke angka 2.424 atau turun sebesar 0.436. Sementara tingkat Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah di daerah perkotaan tercatat pada awal tahun 2012 berada pada angka 2.09 hingga akhir tahun 2016 menurun ke angka 1.689 atau menurun sebesar 0.401.

Grafik 4.3
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks hal ini terbukti bukan hanya sekedar berapa jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin tetapi terdapat hal lain yang masih perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Pemerintah Daerah harus mampu memperkecil atau mengurangi jumlah penduduk miskin, selain itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan kemiskinan yang tentunya dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Terdapat beberapa perbedaan antara Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah rata-rata ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan hanya

menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara masing-masing penduduk miskin.

Dapat dilihat dari Grafik 4.2 dan Grafik 4.3 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) setiap tahun angkanya fluktuatif, namun pada tahun terakhir angkanya menunjukkan kecenderungan menurun. Pada bulan Maret tahun 2016 angka Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah 2.254 pada bulan Maret 2016 sementara pada bulan September 2016 angka Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan menjadi 2.087, sedangkan pada bulan Maret tahun 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0.565 menjadi 0.508 di bulan September tahun 2016. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar masing-masing penduduk miskin juga cenderung semakin menyempit.

C. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

Tingkat upah merupakan persoalan umum yang sudah lama diketahui oleh banyak kalangan. Nilai standar minimum yang diperoleh para pekerja dari hasil perundingan para pelaku industri atau pengusaha adalah tingkat upah minimum.

Di dalam beberapa negara baik negara maju maupun berkembang terdapat masalah ketenagakerjaan seperti kebijakan upah minimum yang telah menjadi isu penting. Tujuan penerapan kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi atau mencukupi kebutuhan hidup minimum bagi para pekerja dan keluarganya.

Dengan demikian, tujuan penerapan kebijakan upah minimum adalah untuk (a) pekerja mendapat jaminan penghasilan kerja yang tidak lebih rendah dari suatu tingkat penghasilan tertentu, (b) meningkatkan produktivitas para pekerja, (c) meningkatkan cara produksi perusahaan sehingga lebih efisien (Sumarsono,2003).

Upah minimum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sesuai dengan hukum penawaran yang berlaku apabila tingkat upah rendah maka mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sedikit sebaliknya jika tingkat upah tinggi maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan turut meningkat.

Berdasarkan pendapat dari (Simanjuntak,1985), terdapat beberapa permasalahan dalam sistem pengupahan, antara lain :

1. Perbedaan persepsi antara pengusaha dan pekerja

Dalam hal upah pemberi kerja atau pengusaha memiliki perbedaan kepentingan dan persepsi. Bagi pengusaha, selama ini upah yang diberikan untuk para pekerja masih dianggap sebagai beban, hal tersebut digambarkan dengan apabila semakin tinggi upah yang diberikan kepada pekerja maka keuntungan yang didapat oleh pengusaha akan semakin berkurang atau kecil. Upah terbagi dalam beberapa bentuk, tidak hanya dalam bentuk uang tunai melainkan juga sesuatu yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dalam bentuk seperti transportasi, tunjangan beras, konsumsi yang diberikan saat bekerja, kesehatan, cuti dan sakit, tunjangan saat libur, fasilitas rekreasi dan fasilitas lain sebagainya atau bisa disebut dengan fringe benefits. Sedangkan

menurut pengusaha upah merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha hanya dalam bentuk uang (take-home pay).

2. Keanekaragaman sistem pengupahan

Dalam perusahaan, besar atau kecilnya proporsi upah dalam bentuk natura dan fringe benefits tidak sama, sehingga hal ini sering mengakibatkan terjadi kesulitan dalam perumusan kebijakan nasional, misalnya seperti dalam penentuan upah minimum, pajak pendapatan, upah lembur dan lain sebagainya.

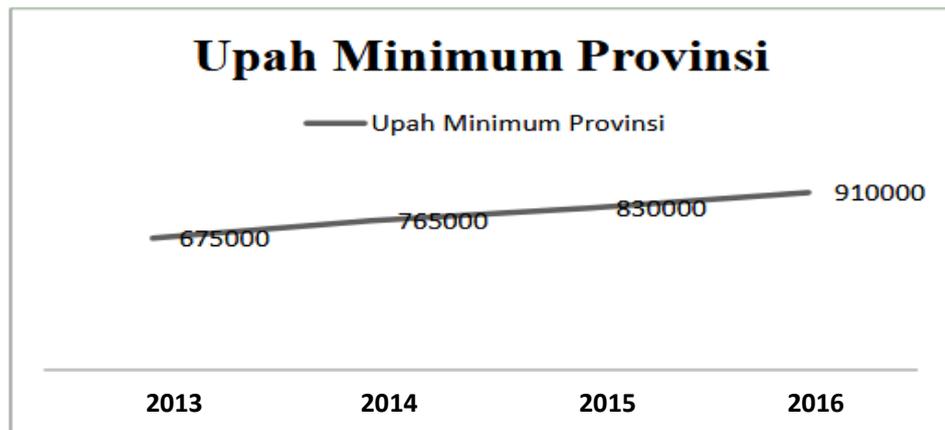
3. Rendahnya tingkat upah

Beberapa permasalahan upah yang ada saat ini, seperti karyawan yang masih berpenghasilan rendah bahkan lebih rendah dari kebutuhan fisik minimumnya sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tingkat upah minimum setiap tahunnya dapat berubah, hal itu dikarenakan kondisi dan situasi perekonomian nasional maupun daerah yang fluktuatif. Perbedaan persentase kenaikan upah minimum untuk setiap daerah berbeda dibagi dengan melihat beberapa aspek : indeks harga konsumen, kebutuhan hidup minimal, upah pada umumnya yang berlaku di setiap daerah, kelangsungan perusahaan serta kondisi pasar kerja pada tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Berikut upah minimum yang menggambarkan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2016 :

Grafik 4.4
Grafik Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Grafik 4.4 menunjukkan bahwa upah minimum di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga 2016 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 tingkat upah minimum sebesar Rp. 675.000 mengalami kenaikan di tahun 2014 menjadi Rp. 765.000 dan di tahun 2015 menjadi Rp. 830.000. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 910.000.

Dalam Teori Solow menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja hal ini meliputi pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan, penambahan modal dan teknologi. Sedangkan pembangunan manusia adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. (Todaro,2011).

D. Kondisi Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang atau sekelompok orang yang sudah tergolong angkatan kerja, namun masih mencari pekerjaan untuk mendapatkan tingkat upah yang ditentukannya namun belum juga mendapatkannya. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah gambaran presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. (BPS, 2014).

Tabel 4.5
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,
Tahun 2015-2016

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2015		2016	
			Feb	Agust	Feb	Agust
1.	Angkatan Kerja	Juta orang	17.41	17.53	17.73	17.56
	Bekerja	Juta orang	16.45	16.48	16.76	16.56
	Pengangguran	Juta orang	0.97	1.06	0.98	1.01
2.	Bukan Angkatan Kerja	Juta orang	7.28	7.37	7.27	7.65
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Juta orang	70.55	70.44	70.94	69.69
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Juta orang	5.54	6.02	5.46	5.69
5.	Pekerja Tidak Penuh	Juta orang	4.70	5.22	4.86	4.91
	Setengah Penganggur Paruh Waktu	Juta orang	1.90	1.50	1.29	1.20
		Juta orang	2.81	3.73	3.58	3.72

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat perubahan peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, namun perubahan tersebut tidak dibarengi dengan tingkat pengangguran yang berkurang. Pada bulan Agustus 2016 jumlah angkatan kerja mencapai 17.56 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari bulan Februari tahun 2016 yang lalu sebanyak 17,73 juta orang. Selain itu, jumlah pengangguran pada tahun 2015 pada bulan Februari hingga Agustus masih cukup tinggi begitupun pada tahun 2016.

Tabel 4.6
Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Tahun	Bulan	
	Februari (%)	Agustus (%)
2014	5.91	5.62
2015	5.54	6.02
2016	5.46	5.69

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Jika dilihat dari Tabel 4.6 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka terendah berada pada bulan Februari tahun 2016 sebesar 5.46%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada pada bulan Agustus tahun 2015 sebesar 6.02%.

E. Pendidikan

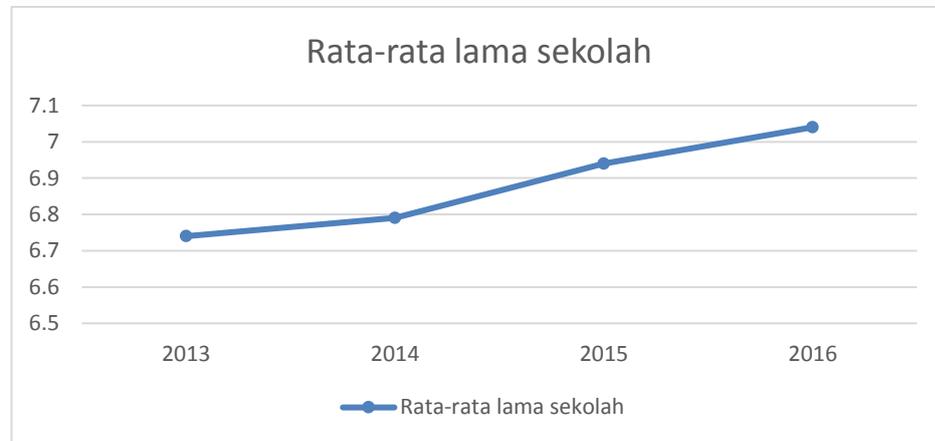
Sistem Pendidikan di Republik Indonesia diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003. Pendidikan merupakan suatu usaha dari seseorang dalam meningkatkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kepribadian yang baik, kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Faturrohmin (2011) bahwa pendidikan merupakan ujung tombak pembangunan bagi masa depan suatu negara. Bila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang rusak maka kehancuran negara tersebut hanya menghitung waktu. Negara yang ingin maju maka pendidikan harus dijadikan prioritas utama

karena pendidikan mempengaruhi pembangunan karakter sekaligus pertahanan jati diri manusia suatu negara. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata lama sekolah pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah 6,9 tahun, rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun di Provinsi Jawa Tengah grafiknya selalu mengalami kenaikan.

Dapat dilihat Grafik 4.5 bahwa rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2013 mencapai angka 6,74 tahun dan pada tahun 2016 mencapai 7,04 tahun. Disini terlihat bahwa terdapat peningkatan nilai, namun belum dapat melampaui angka 9 tahun bahkan ketika pemerintah sudah merencanakan penerapan wajib belajar 12 tahun yang rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2015/2016.

Grafik 4.5
Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata lama sekolah yang masih di bawah rata-rata. Hal ini tentunya pemerintah diharapkan berperan penting dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah supaya sumber daya manusia yang tercipta lebih berkualitas. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, tentu masyarakat akan mudah paham akan sesuatu dan itu dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah tertinggi dari tahun 2012-2016 di Provinsi Jawa Tengah diduduki dua wilayah sekaligus Kota Magelang dan Kota Surakarta yaitu dengan angka sebesar 10,22 tahun sedangkan RLS terendah berada di Kabupaten Brebes dengan hanya sebesar 5,61 tahun. Pada tahun 2016, RLS tertinggi ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 10,36 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan didukung juga oleh sarana prasarana pendidikan yang sudah terjamin serta banyaknya masyarakat dari semua lapisan dapat menikmati

pendidikan yang sama dan layak disamping karena adanya program dari pemerintah yaitu pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu maupun putus sekolah.

Tabel 4.7
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Cilacap	6,28	6,29	6,44	6,49	6,59	6,42
Banyumas	6,95	7,07	7,19	7,32	7,14	7,17
Purbalingga	6,34	6,45	6,69	6,85	6,86	6,64
Banjarnegara	5,85	5,86	5,87	5,91	6,18	5,93
Kebumen	6,3	6,31	6,4	6,76	7,05	6,56
Purworejo	7,46	7,52	7,58	7,64	7,66	7,57
Wonosobo	5,88	5,91	5,93	6,08	6,12	5,98
Magelang	6,74	6,81	6,89	7,03	7,2	6,93
Boyolali	6,54	6,56	6,62	6,7	7,2	6,71
Klaten	7,36	7,44	7,75	7,93	8,17	7,73
Sukoharjo	7,95	8,1	8,26	8,42	8,51	8,25
Wonogiri	5,67	6,04	6,13	6,24	6,4	6,1
Karanganyar	7,47	7,81	8,39	8,48	8,49	8,13
Sragen	6,27	6,29	6,7	6,86	6,87	6,6
Grobogan	6,19	6,24	6,26	6,33	6,34	6,27
Blora	5,78	5,84	5,91	6,03	6,05	5,92
Rembang	6,29	6,42	6,71	6,91	6,93	6,65
Pati	6,12	6,16	6,28	6,36	6,72	6,33
Kudus	7,49	7,61	7,74	7,84	7,85	7,71
Jepara	6,73	6,97	7,1	7,3	7,32	7,08
Demak	6,76	6,89	7,23	7,45	7,46	7,16
Semarang	7,21	7,25	7,29	7,32	7,34	7,28
Temanggung	6,04	6,09	6,14	6,19	6,53	6,2
Kendal	6,25	6,37	6,43	6,54	6,65	6,45
Batang	5,67	5,71	5,89	6,01	6,42	5,94
Pekalongan	6,05	6,16	6,38	6,54	6,56	6,34
Pemalang	5,2	5,52	5,73	5,88	6,05	5,68
Tegal	5,72	5,79	5,86	5,94	6,31	5,92
Brebes	5,25	5,39	5,69	5,87	5,89	5,62
Kota Magelang	10,15	10,21	10,23	10,28	10,29	10,23
Kota Surakarta	10,06	10,12	10,26	10,34	10,37	10,23
Kota Salatiga	8,98	9,1	9,21	9,38	9,82	9,3
Kota Semarang	9,81	9,93	10,07	10,2	8,28	10,04

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kota Pekalongan	7,73	7,81	7,97	8,13	8,29	7,99
Kota Tegal	7,67	7,86	8,06	8,27	8,28	8,03
Jawa Tengah	6,75	6,78	6,81	6,94	7,04	6,86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 terendah pada Kabupaten Brebes yaitu sebesar 5,89 tahun. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah, selain itu terdapat beberapa faktor lain seperti faktor kelayakan sarana prasarana sekolah dan pelayanan belajar. Pada beberapa kecamatan, layanan pendidikan yang baik dan berkualitas dirasa masih sangat jauh dari yang diharapkan serta masih banyak prasarana gedung yang rusak. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula rata-rata lama sekolah, sehingga berdampak pada semakin tinggi pula pola pikir dan kualitas individu tersebut. Sehingga, orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

F. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan di dunia. Manfaat dari kesehatan lainnya adalah sebagai investasi peningkatan kualitas individu dan dapat meningkatkan pembangunan guna memberantas kemiskinan. Kesehatan disini dinyatakan dalam Angka Harapan Hidup. Dimana Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa atau banyaknya tahun yang ditempuh seseorang yang masih hidup hingga umur tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kota Pekalongan	7,73	7,81	7,97	8,13	8,29	7,99
Kota Tegal	7,67	7,86	8,06	8,27	8,28	8,03
Jawa Tengah	6,75	6,78	6,81	6,94	7,04	6,86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 terendah pada Kabupaten Brebes yaitu sebesar 5,89 tahun. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah, selain itu terdapat beberapa faktor lain seperti faktor kelayakan sarana prasarana sekolah dan pelayanan belajar. Pada beberapa kecamatan, layanan pendidikan yang baik dan berkualitas dirasa masih sangat jauh dari yang diharapkan serta masih banyak prasarana gedung yang rusak. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula rata-rata lama sekolah, sehingga berdampak pada semakin tinggi pula pola pikir dan kualitas individu tersebut. Sehingga, orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

G. Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan di dunia. Manfaat dari kesehatan lainnya adalah sebagai investasi peningkatan kualitas individu dan dapat meningkatkan pembangunan guna memberantas kemiskinan. Kesehatan disini dinyatakan dalam Angka Harapan Hidup. Dimana Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa atau banyaknya tahun yang ditempuh seseorang yang masih hidup hingga umur tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

Tabel 4.8
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (persen)
2012	73,10
2013	73,29
2014	73,89
2015	73,97
2016	73,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Tabel 4.8 menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki angka harapan hidup yang setiap tahunnya berbeda. Pada tahun 2012 angka harapan hidup yang pendek di Provinsi Jawa Tengah yaitu dalam angka 73,10, pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan di angka sebesar 73,29. Pada tahun 2014 angka harapan hidup meningkat menjadi 73,89 dan pada tahun 2015 masih terus meningkat hingga angka sebesar 73,97 namun berbeda pada tahun 2016 angka harapan hidup mengalami sedikit penurunan menjadi 73,43.